



Kerangka Acuan Kegiatan

Diskusi tentang Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual

Jakarta, 3 September 2018

Latarbelakang

Studi selama Agustus – Oktober 2017 menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 367 berita tentang kekerasan seksual. Sebanyak 74,9 persen terjadi di dalam negeri, yakni berjumlah 275 laporan. Kategori korban anak-anak mendominasi kasus kekerasan seksual selama tiga bulan terakhir, yaitu sebanyak 86 persen berita kasus anak, dan 14 persen kasus dengan korban orang dewasa

Saat ini, pemerintah Indonesia bersama dewan legislatif sedang berupaya untuk mengesahkan rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Keberadaan regulasi tersebut dinilai menjadi kebutuhan di tengah semakin maraknya kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak

Kekerasan seksual sudah terjadi sejak dari dulu sampai sekarang. Pelakunya sebagian besar melenggang bebas lepas dan melakukannya berulang kali entah dengan orang yang sama atau orang yang berbeda, di tempat yang sama atau di tempat yang berbeda. Pelakunya dikenal maupun tidak dikenal, sebagian besar diterima sebagai yang dihormati dan dijunjung sebagai orang yang melindungi korban. Pada periode tumbuhnya kesadaran warga, bahwa setiap orang berhak atas jaminan keamanan, tindak kekerasan seksual tidak lagi dianggap suatu tindakan yang wajar dan boleh bebas melakukannya di mana saja, kapan saja dan kepada siapapun saja. Kekerasan seksual yang meningkat jumlah dan bentuk kegiatannya dianggap melanggar hak setiap warga negara atas keamanan.

Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) sejak didirikan, memiliki perhatian khusus terkait kasus kekerasan seksual, terutama di masa tanggap darurat. Studi menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual cenderung meningkat di masa bencana, terutama terhadap perempuan dan anak. Apa saja pembelajaran yang bisa didapat pada penanganan bencana terdahulu? Bagaimana kita bisa mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual? Dan bagaimana caranya menindak kasus, baik di masa normal dan di masa bencana?

Menimbang hal itu, MPBI mengajak para pemerhati isu kebencanaan dan kekerasan seksual Bersama-sama mendiskusikan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini.

Tujuan

- Mendokumentasikan praktik-praktik baik dan pembelajaran terkait kekerasan seksual di masa bencana



MASYARAKAT PENANGGULANGAN BENCANA INDONESIA

INDONESIAN SOCIETY FOR DISASTER MANAGEMENT

Sekretariat : Jl. Kalasan No. 45B, Menteng, Jakarta 10320

email: perkumpulanmpbi@yahoo.co.id; Web: www.mpbi.info

- Mengkaji rancangan Undang-Undang yang ada terkait isu kekerasan seksual dalam konteks penanggulangan bencana
- Merumuskan rekomendasi untuk perbaikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Sasaran

Pada akhir diskusi, sudah:

1. Dibicarakan permasalahan seputar kekerasan seksual
2. Disepakati usulan perbaikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Waktu dan tempat

Diskusi diadakan di Jakarta, di ruang Rapat MPBI, Jl. Kalasan NO. 45 B, kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng (dekat RS THT Proklamasi).

Waktu diskusi akan diadakan pada hari Senin, 3 September 2018, jam 13:00-15:00 WIB

Peserta

Peserta yang diharapkan terlibat adalah para pemerhati dan/ atau penyintas Kekerasan Seksual sejumlah maksimal 15 orang. Kuota terbatas.

Moderator

Moderator diskusi ini adalah Bpk. Suratman SH, MH – tenaga ahli DPR, Pengawas MPBI.

Penyelenggara

Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) menjadi penyelenggara kegiatan ini. Kontak untuk konfirmasi kehadiran ke Ibu Siti Istikana, melalui WA atau SMS ke 0818 119 227, atau imel: siti.istikana@gmail.com

Biaya

Sukarela